

DINAMIKA PENGEMBANGAN KURIKULUM DITINJAU DARI DIMENSI POLITISASI PENDIDIKAN DAN EKONOMI

Sulthon

STAIN Kudus, Jawa Tengah, Indonesia
sulthon52@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini berupaya menelaah tentang dinamika pengembangan kurikulum ditinjau dari dimensi politisasi pendidikan dan ekonomi. Kurikulum sebagai bagian dari faktor penting dalam pendidikan memiliki posisi strategis dalam mewarnai dan menentukan kualitas output pendidikan. Hitam putihnya kualitas pendidikan sesungguhnya sangat ditentukan oleh eksistensi kurikulum tersebut. Dalam pelaksanaannya, kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menuntut keteraturan, ketertiban dan kecermatan dalam berpikir, tentang hubungan data yang satu dengan data yang lain dan konteksnya dalam masalah yang akan diungkapkan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya perubahan kurikulum diperlukan setiap saat karena kurikulum akan selalu merespon perkembangan dalam kehidupan, baik perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan sosial dan budaya, dan perkembangan politik. Di samping itu, dalam perkembangannya kurikulum harus memperhatikan unsur peserta didik, satuan pendidikan, masyarakat, dan peranan pengembang kurikulum terutama guru. Peserta didik sebagai obyek kurikulum harus mendapat prioritas utama dalam pengembangan kurikulum.

Kata kunci: dinamika, pengembangan, kurikulum, politisasi

Abstract

THE DYNAMICS OF CURRICULUM DEVELOPMENT IN TERMS OF POLITICIZATION DIMENSIONS OF EDUCATION AND ECONOMY. This paper attempts to examine about the changing dynamics of the curriculum in terms of the dimensions of the politicization of education and economics. Curriculum is as an important factor in education has a strategic position in coloring and determining the quality of educational output. The black-and-white of education quality is determined by the existence of the curriculum. In its implementation, this study uses qualitative research. Qualitative research requires regularity, order and precision in thinking about the relationship of the data each other and its context in the problem that will be revealed. The results of this research show that any change of the curriculum is required at any time due to the curriculum will always respond to developments in life, both development of science and technology, social and cultural development, and political developments. In addition, the curriculum should pay attention to the elements of the learners, education, society, and the role of curriculum developers especially teachers. Learners as an object of curriculum should get top priority in the development of the curriculum.

Keywords: *dynamics, development, curriculum, politicization,*

A. Pendahuluan

Pendidikan memiliki peran penting sebagai agen perubahan sosial (*social agent of change*) menuju dinamika kemajuan yang serasi dan seimbang sesuai dengan tuntutan kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan selalu diarahkan untuk mencapai tujuan secara nasional. Tujuan pendidikan nasional diharapkan dapat melahirkan manusia Indonesia yang religius dan bermoral; mampu menguasai ilmu pengetahuan dan ketrampilan; sehat jasmani dan rohani; berkepribadian dan bertanggung jawab. Pendidikan dalam konteks pembangunan nasional mempunyai tugas utama: untuk menjadi alat pemersatu bangsa, memberikan pemerataan kesempatan, dan memberikan pembinaan dan pengembangan potensi diri anak.

Pendidikan diharapkan dapat memperkuat keutuhan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Disamping itu, pendidikan juga memberi kesempatan yang sama bagi setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam pembangunan, dan memungkinkan

setiap warga negara untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya secara optimal. Untuk mencapai tujuan tersebut hal yang perlu dikembangkan adalah menyangkut kurikulum pendidikan karena salah satu dimensi yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan dunia pendidikan nasional di masa depan adalah kebijakan mengenai kurikulum. Kurikulum merupakan jantungnya dunia pendidikan. Untuk itu, kurikulum di masa depan perlu dirancang dan disempurnakan untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional dan meningkatkan mutu sumber daya manusia yang handal.

Kualitas pendidikan untuk menyiapkan sumber daya yang handal di atas sangat ditentukan oleh berbagai komponen yang saling terkait satu sama lain, yaitu input peserta didik, kurikulum, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana prasarana, dana, manajemen, dan lingkungan. Kurikulum merupakan salah satu komponen pendidikan yang sangat strategis karena merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (Hamalik, 2008: 59). Kurikulum sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran memberikan makna bahwa di dalam kurikulum terdapat panduan interaksi antara guru dan peserta didik. Dengan demikian, kurikulum berfungsi sebagai “nafas atau inti” dari proses pendidikan di sekolah untuk memberdayakan potensi peserta didik.

Kurikulum sebagai bagian dari komponen sistem pendidikan nasional selalu mengalami dinamika perubahan sejalan dengan perkembangan ilmu dan sosial budaya masyarakat. Terkait dengan relevansi kurikulum dengan mempersiapkan siswa menghadapi dunia globalisasi, maka kurikulum harus memperhatikan aspek-aspek perkembangan IPTEK dan IMTAK terutama menyangkut penyediaan dasar keterampilan, kecerdasan, dan kreativitas serta kepribadian. Senada dengan ini kurikulum Amerika tahun 2007 telah mencanangkan tiga tujuan utama dalam kurikulum yaitu:

- 1) *Basic Skills*” incorporates skills such as reading, writing, mathematics, and speaking.
- 2) *“Thinking Skills”* includes creative thinking, the ability to problem-solve and make decisions, the capacity to reason and “see things in the mind’s eye” (which I take to mean imagination), and knowing how to learn.
- 3) *Personal Qualities*” they are seeking workers who are responsible,

sociable able to work with others--have a sense of self-esteem, and integrity, are honest, and skilled at self-management (Oliva,1992: 233).

Ada tiga faktor yang mempengaruhi pengembangan kurikulum, yaitu: perguruan tinggi, masyarakat, dan sistem nilai.

1. Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi setidaknya memberikan dua pengaruh terhadap kurikulum sekolah.

Pertama, dari segi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di perguruan tinggi umum. Pengetahuan dan teknologi banyak memberikan sumbangan bagi isi kurikulum serta proses pembelajaran. Jenis pengetahuan yang dikembangkan di perguruan tinggi akan mempengaruhi isi pelajaran yang akan dikembangkan dalam kurikulum. Perkembangan teknologi selain menjadi isi kurikulum juga mendukung pengembangan alat bantu dan media pendidikan.

Kedua, dari segi pengembangan ilmu pendidikan dan keguruan serta penyiapan guru-guru Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK, seperti IKIP, FKIP, STKIP). Kurikulum Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan juga mempengaruhi pengembangan kurikulum, terutama melalui penguasaan ilmu dan kemampuan keguruan dari guru-guru yang dihasilkannya.

Penguasaan keilmuan, baik ilmu pendidikan maupun ilmu bidang studi serta kemampuan mengajar dari guru-guru akan sangat mempengaruhi pengembangan dan implementasi kurikulum di sekolah. Guru-guru yang mengajar pada berbagai jenjang dan jenis sekolah yang ada dewasa ini, umumnya disiapkan oleh LPTK melalui beberapa program, yaitu program diploma dan sarjana. Pada Sekolah Dasar masih banyak guru memiliki latar belakang pendidikan SPG dan SGO, akan tetapi hal tersebut secara berangsur-angsur mereka mengikuti peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidikan guru melalui program diploma dan sarjana.

2. Masyarakat

Sekolah merupakan bagian dari masyarakat, yang diantaranya bertugas mempersiapkan anak didik untuk dapat hidup secara bermartabat di masyarakat. Sebagai bagian dan agen masyarakat,

sekolah sangat dipengaruhi oleh lingkungan masyarakat di tempat sekolah tersebut berada. Isi kurikulum hendaknya mencerminkan kondisi masyarakat penggunaannya serta upaya memenuhi kebutuhan dan tuntutan mereka.

Masyarakat yang ada di sekitar sekolah mungkin merupakan masyarakat yang homogen atau heterogen. Sekolah berkewajiban menyerap dan melayani aspirasi-aspirasi yang ada di masyarakat. Salah satu kekuatan yang ada dalam masyarakat adalah dunia usaha. Perkembangan dunia usaha yang ada di masyarakat akan mempengaruhi pengembangan kurikulum. Hal ini karena sekolah tidak hanya sekedar mempersiapkan anak untuk selesai sekolah, tetapi juga untuk dapat hidup, bekerja, dan berusaha. Jenis pekerjaan yang ada di masyarakat berimplikasi pada kurikulum yang dikembangkan dan digunakan sekolah.

3. Sistem Nilai

Dalam kehidupan bermasyarakat terdapat sistem nilai, baik nilai moral, keagamaan, sosial, budaya maupun nilai politis. Sekolah sebagai lembaga masyarakat juga bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pewarisan nilai-nilai positif yang tumbuh di masyarakat.

Sistem nilai yang akan dipelihara dan diteruskan tersebut harus terintegrasikan dalam kurikulum. Persoalannya bagi pengembang kurikulum ialah nilai yang ada di masyarakat itu tidak hanya satu. Masyarakat umumnya heterogen, terdiri dari berbagai kelompok etnis, kelompok vokasional, kelompok intelek, kelompok sosial, dan kelompok spritual keagamaan, yang masing-masing kelompok itu memiliki nilai khas dan tidak sama. Dalam masyarakat juga terdapat aspek-aspek sosial, ekonomi, politik, fisik, estetika, etika, religius, dan sebagainya. Aspek-aspek tersebut sering juga mengandung nilai-nilai yang berbeda.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengakomodasi berbagai nilai yang tumbuh di masyarakat dalam kurikulum sekolah, diantaranya:

1. Mengetahui dan memperhatikan semua nilai yang ada dalam masyarakat

2. Berpegang pada prinsip demokratis, etis, dan moral
3. Berusaha menjadikan dirinya sebagai teladan yang patut ditiru
4. Menghargai nilai-nilai kelompok lain
5. Memahami dan menerima keragaman budaya yang ada (Sukmadinata, 2006: 158)

Dunia akan tetap berubah dengan cepat, terlepas dari dunia pendidikan mau berubah atau tidak. Model-model sekolah baru, eksperimentasi pendidikan, kiat layanan pendidikan yang baru, E-learning, distant learning, contextual learning, pendekatan multi-kecerdasan, penggunaan internet dalam pendidikan, pemanfaatan jejaring pendidikan harus selalu dikembangkan untuk mengubah organisme pendidikan agar terus beradaptasi bagi kepentingan masyarakat yang berubah. Beberapa rekomendasi yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum, yaitu: 1) Penyusunan kurikulum sebaiknya menganut prinsip benar, baik, dan indah, 2) Kurikulum yang dikembangkan sebaiknya terkait dengan “teori pengetahuan”, 3) Pengetahuan sebagai kebenaran dan bukan sebagai “*vested interests*”, 4) Perlu diperhatikan aspek-aspek normatif kurikulum, seperti peran pendidikan nilai dalam kurikulum, pengaruh kultur sosial dan tuntutan masyarakat atau keperluan individu, dan perancangan kurikulum yang kontekstual tanpa kehilangan aspek normatif, 5) Pengintegrasian “teori nilai” sambil memperhatikan hirarki nilai, serta sosialisasi nilai dasar kemanusiaan yang universal sejak jenjang pendidikan dasar, 6) Pemberian perhatian kepada dimensi estetika kurikulum (Hamalik, 1995: 38).

Syaodih (2004: 96) mengemukakan bahwa kurikulum mempunyai kedudukan sentral dalam seluruh proses pendidikan. Kurikulum mengarahkan segala bentuk aktivitas pendidikan demi tercapainya tujuan pendidikan. Dengan demikian kurikulum sebagai alat untuk mencapai tujuan pendidikan yaitu; mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berrilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab (UU Sisdiknas 2003 Bab I pasal 3). Agar lulusan pendidikan nasional memiliki keunggulan kompetitif

dan komperatif sesuai standar mutu nasional dan internasional, kurikulum di masa depan perlu dirancang sedini mungkin. Hal ini harus dilakukan agar sistem pendidikan nasional dapat merespon secara proaktif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Dengan cara seperti ini lembaga pendidikan tidak akan kehilangan relevansi program pembelajarannya terhadap kepentingan peserta didik.

Kurikulum sebagai penentu keberhasilan pendidikan selalu dikembangkan dengan memperhatikan berbagai aspek yang terkait diantaranya menyangkut dasar filosofis, ilmu pendidikan, peserta didik, dan perkembangan IPTEK. Asas filosofis berarti dalam mengembangkan kurikulum harus memperhatikan nilai-nilai dan pandangan hidup yang dianut suatu bangsa yang menjelma menjadi watak atau karakter bangsa. Dasar ilmu pendidikan berarti perkembangan kurikulum tidak boleh keluar dari bingkai teori kependidikan yang menjadi dasar substansi kependidikan agar selalu selaras dan serasi dengan konsep pendidikan yang humanis dan demokratis. Perkembangan peserta didik maksudnya dalam mengembangkan kurikulum harus didasarkan pada fase perkembangan peserta didik yang menjadi sentral pelaksanaan kurikulum. Kurikulum yang akan dikembangkan juga harus selaras dengan perkembangan IPTEK dalam hal ini menyangkut relevansi dan kontinuitas perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dinyatakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah/karakteristik daerah, sosial budaya masyarakat setempat, dan peserta didik. Sekolah dan komite sekolah, atau madrasah dan komite madrasah mengembangkan kurikulum tingkat satuan pendidikan dan silabusnya berdasarkan kerangka dasar kurikulum dan standar kompetensi lulusan.

Mutu pendidikan yang tinggi diperlukan untuk menciptakan kehidupan yang cerdas, damai, terbuka, demokratis, dan mampu bersaing sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan semua warga negara Indonesia. Kesejahteraan bangsa Indonesia di masa depan bukan lagi bersumber pada sumberdaya alam dan modal yang bersifat fisik, tetapi bersumber pada modal intelektual, modal sosial, dan

kredibilitas sehingga tuntutan untuk terus menerus memutakhirkan pengetahuan menjadi suatu keharusan. Mutu lulusan tidak cukup bila diukur dengan standar lokal saja sebab perubahan global telah sangat besar mempengaruhi ekonomi suatu bangsa. Terlebih lagi, industri baru dikembangkan dengan berbasis kompetensi tingkat tinggi, maka bangsa yang berhasil adalah bangsa yang berpendidikan dengan standar mutu yang tinggi. Agar lulusan pendidikan nasional memiliki keunggulan kompetitif dan komperatif sesuai standar mutu nasional dan internasional, kurikulum di masa depan perlu dirancang sedini mungkin. Hal ini harus dilakukan agar sistem pendidikan nasional dapat merespon secara proaktif berbagai perkembangan informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Tidak tercapainya tujuan pendidikan secara umum juga banyak disebabkan diantaranya oleh kurang terpenuhinya keempat aspek di atas dalam pengembangan kurikulum. Pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita dewasa ini, yaitu:

1. Bagaimana semua warga Negara dapat menikmati kesempatan pendidikan.
2. Bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun kedalam kancah kehidupan bermasyarakat.

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa permasalahan yang pertama yaitu mengenai masalah pemerataan, dan yang kedua adalah masalah mutu, relevansi, dan juga efisiensi pendidikan (Umar, 2005: 225). Masalah pemerataan pendidikan adalah persoalan bagaimana sistem pendidikan dapat menyediakan kesempatan yang seluas-luasnya kepada seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan, sehingga pendidikan itu menjadi wahana bagi pembanguana sumber daya manusia untuk menunjang pembangunan. Masalah pemerataan pendidikan timbul apabila masih banyak warga Negara khususnya anak usia sekolah yang tidak dapat di tampung dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan.

Dalam prakteknya, pendidikan selalu menjadi alat

pemerintah untuk mempolitisasi tujuan-tujuan pendidikan dalam mempertahankan eksistensinya. Sebagai ilustrasi disini bahwa setiap pergantian pemerintah akan dibarengi dengan perubahan kurikulum yang ujung-ujungnya tidak ada perubahan substansi perbaikannya namun hanya sekedar ganti nama atau label, dimana semua akan diorientasikan pada kepentingan politik semata.

Disamping untuk tujuan pendidikan politik yang nantinya agar peserta didik dapat berpartisipasi dalam politik, pendidikan juga sudah merambah pada politik ekonomi dimana pendidikan tidak lagi mengutamakan pemerataan dan kesempatan tapi lebih kepada budaya kapitalis yang berdampak pada materi. Selama pendidikan belum kembali pada ruhnya sebagai agen perubahan menuju masyarakat madani maka selama itu pula tujuan pendidikan hanya sebatas jargon yang diagungkan tanpa makna. Dan selama itu pula perubahan kurikulum tidak akan meningkatkan kualitas pendidikan yang sesungguhnya namun lebih mendukung praktek politik yang memenuhi kepentingan kapitalis.

Sebagai bahan pertimbangan dan perenungan dalam membangun pendidikan, perkembangan kurikulum harus diorientasikan pada enam masalah pokok pendidikan di atas sebagai sentral dalam pengembangan kurikulum yaitu mengacu pada empat konsepsi kurikulum yaitu (1) konsepsi kurikulum humanistik yaitu konsep kurikulum yang mengutamakan perkembangan kesadaran pribadi untuk pencapaian aktualisasi diri, (2) konsepsi kurikulum rekonstruksi sosial yaitu konsep kurikulum yang berorientasi pada penyiapan peserta didik agar dapat menghadapi berbagai perubahan masyarakat pada masa yang akan datang dan dapat menyesuakannya, (3) konsepsi kurikulum teknologi yaitu konsep kurikulum yang menekankan pada pengembangan hasil pendidikan yang dapat ditiru, dan (4) konsepsi kurikulum subjek akademik yaitu konsep kurikulum yang bertujuan untuk mengembangkan pola pikir pesera didik (Sukmadinata. 2009: 81).

Dari latar belakang diatas, kajian ini difokuskan untuk melihat sejauh mana dinamika pengembangan kurikulum ditinjau dari dimensi politisasi pendidikan dan ekonomi. Dalam pelaksanaanya, kajian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif

Sulthon

menuntut keteraturan, ketertiban dan kecermatan dalam berpikir tentang bagaimanakah pengembangan kurikulum melihat dari beberapa perubahannya serta menganalisis hubungan data yang satu dengan data yang lain dan keterkaitannya dengan politisasi.

B. Pembahasan

1. Sejarah Perkembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum adalah upaya penambahan, penyesuaian, peningkatan, pemanfaatan dan pendayagunaan kurikulum yang berupa seperangkat rencana yang berisi tujuan, isi, materi, pedoman pembelajaran dan evaluasi yang dilaksanakan, dan dijadikan acuan pelaksanaan pendidikan dalam rangka mencapai tujuan.

Sejarah tentang adanya kurikulum sejalan dengan sejarah munculnya pendidikan itu sendiri. Dalam prakteknya, ada kurikulum 1947, kurikulum tahun 1952, kurikulum tahun 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, dan kurikulum 1994. Kurikulum 2004 Kurikulum 2006, dan sekarang Kurikulum 2013. Secara historis pergantian kurikulum dari satu periode kurikulum ke kurikulum berikutnya selalu memiliki tujuan khusus yang ingin dicapainya. Secara potensial, dalam setiap perubahan kurikulum akan selalu tersirat didalamnya tujuan yang bersifat politis dan non politis. Kurikulum yang satu diganti dengan kurikulum yang lainnya Sampai dengan kurikulum 1984, perubahan kurikulum banyak dipengaruhi oleh perubahan politik.

Kurikulum 1964 disusun untuk meniadakan Manipol-Usdek, kurikulum 1975 digunakan untuk memasukkan Pendidikan Moral Pancasila, kurikulum 1984 digunakan untuk memasukkan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Kurikulum 1994, disamping meniadakan mata pelajaran PSPB juga diperkenalkannya sistem kurikulum SMU yang dimaksudkan untuk menjadikan pendidikan umum benar-benar sebagai pendidikan persiapan ke perguruan tinggi.

Berdasarkan analisis tentang pelaksanaan kurikulum di lapangan, selalu terjadi muatan-muatan politis dalam prakteknya, dan secara realitas dampaknya terasa pada merosotnya sendi-sendi

tujuan pendidikan itu sendiri. Banyak praktek pendidikan yang dikembangkan selalu berujung pada pengembangan kognitif yang harus diukur keberhasilan pendidikan berdasarkan satu-satunya aspek ini. Sehingga efek pembelajaran atau *nurturant effect* dari pembelajaran tidak pernah terjadi.

2. Hubungan Kurikulum dengan Komponen Sistem Pendidikan

Pendidikan harus relevan dengan situasi dan kondisi saat ini, relevan dengan kebutuhan peserta didik dan masa depan peserta didik. Pada sisi manajemen dan pengelolaan, sekolah dapat dipandang sebagai suatu institusi sosial yang menjadi media proses penanaman nilai-nilai budaya dan kebersamaan hidup dalam keberagaman, maka pengembangan iklim sekolah seyogyanya mencerminkan kehidupan yang sesungguhnya, inovasi pendidikan pada dasarnya merupakan suatu investasi SDM sehingga dapat menciptakan iklim yang memungkinkan untuk setiap satuan pendidikan memberikan andil dan berperan serta dalam inovasi pendidikan. Agar dapat memberikan kontribusi itu maka setiap satuan pendidikan harus diberikan payung hukum (yaitu PP No 19 Tahun 2005 tentang SNP) untuk mengembangkan kurikulum sekolah agar institusinya menjadi produktif sehingga dapat lebih bernilai inovatif.

3. Model-Model Pengembangan Kurikulum

Ada beberapa karakteristik utama dari pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan, yaitu: 1) menekankan partisipasi seluruh guru atau perwakilan guru secara proporsional, 2) pengembangan seluruh komponen dan kegiatan kurikulum, 3) guru dan pimpinan perlu terus meningkatkan kemampuannya, 4) harus selektif, adaptif, dan kreatif, 5) merupakan proses berkelanjutan dan dinamis, 6) berfokus pada kebutuhan dan perkembangan peserta didik, 7) memperhatikan kondisi dan perkembangan sosial-budaya masyarakat, 8) memperhatikan kondisi dan kebutuhan faktor-faktor pendukung pelaksanaan (Oliva, 1992: 216).

Dalam karakteristik di atas sebenarnya ada tiga hal yang mendapatkan perhatian utama dalam pengembangan kurikulum oleh satuan pendidikan, yaitu kepentingan peserta didik, kondisi satuan pendidikan dan masyarakat serta peranan para pengembang kurikulum terutama guru. Peserta didik mendapatkan perhatian

utama karena merekalah subyek dan sasaran pokok pendidikan. Semua upaya pendidikan diarahkan pada pengembangan peserta didik atau mahasiswa didik secara optimal. Pengembangan seluruh aspek kepribadiannya, baik aspek fisik-motorik, intelektual, dan sosial maupun emosi. Pengembangan kurikulum minimal menyangkut empat model yang banyak diacu dalam pengembangan kurikulum, yaitu model kurikulum: subyek akademik, humanistik, rekonstruksi sosial, dan kompetensi.

a. Kurikulum Subyek Akademik

Kurikulum subyek akademik, merupakan model konsep kurikulum yang paling tua, sejak sekolah yang pertama dulu berdiri, kurikulumnya boleh dikatakan mirip dengan model ini. Sampai sekarang, walaupun telah berkembang model-model lain, tetapi kebanyakan sekolah tidak dapat melepaskan diri dari model ini. Kurikulum ini menekankan isi atau materi pelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. Penyusunannya relatif mudah, praktis, dan mudah digabungkan dengan model yang lain (Oliva, 1992: 215).

Kurikulum Subyek Akademis bersumber dari pendidikan Klasik, Perenialisme dan Esensialisme, berorientasi kepada masa lalu. Semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Fungsi pendidikan adalah memelihara dan mewariskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan nilai-nilai budaya masa lalu kepada generasi baru. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar adalah berusaha menguasai isi atau materi pelajaran sebanyak-banyaknya. Orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang menguasai seluruh atau sebagian terbesar dari isi pendidikan yang diberikan atau disiapkan oleh guru.

Para pengembang kurikulum tidak perlu susah-susah menyusun dan mengembangkan bahan sendiri. Mereka tinggal memilih bahan-bahan materi ilmu yang telah dikembangkan oleh para ahli disiplin ilmu, kemudian mereorganisasinya secara sistematis, sesuai dengan tujuan pendidikan dan tahap perkembangan peserta didik yang akan mempelajarinya. Guru sebagai penyampai bahan ajar memegang peranan penting. Mereka harus menguasai semua pengetahuan yang menjadi isi kurikulum.

Kurikulum subyek akademis tidak berarti terus tetap

hanya menekankan pada materi yang disampaikan, dalam sejarah perkembangannya secara berangsur memperhatikan juga proses belajar yang dilakukan peserta didik. Proses belajar yang dipilih sangat tergantung pada segi apa yang dipentingkan dalam materi pelajaran tersebut. Jerome Bruner dalam bukunya *"The Process of Education"*, menyarankan bahwa disain kurikulum hendaknya didasarkan atas struktur dari disiplin ilmu. Selanjutnya ia menegaskan bahwa kurikulum suatu mata pelajaran harus didasarkan atas pemahaman yang mendasar yang dapat diperoleh dari prinsip-prinsip yang mendasarinya yang memberi struktur kepada suatu disiplin ilmu (Oliva, 1992:43).

Beberapa kegiatan belajar memberi kemungkinan untuk mengadakan generalisasi, suatu pengetahuan dapat digunakan dalam konteks yang lain daripada hanya sekedar yang dipelajarinya, dapat merangsang ingatan apabila peserta didik diminta untuk menghubungkannya dengan masalah lain. Seorang peserta didik yang belajar fisika umpamanya, ia harus melakukan kegiatan belajar sebagaimana seorang ahli fisika melakukannya. Hal seperti itu akan dapat mempermudah proses belajar fisika bagi peserta didik.

Penekanan pada segi intelektual ini dianut oleh hampir seluruh proyek pengembangan kurikulum pada tahun 1960-an di sekolah-sekolah negara bagian Amerika Serikat. Para pengembang kurikulum pada masa itu, adalah para ahli mata pelajaran yang menyusun bahan ajaran di sekitar unsur-unsur struktural mendasar dari disiplin ilmunya, menyangkut problema, konsep-konsep inti, prinsip-prinsip, dan cara-cara bagaimana berinkuiri.

Salah satu contoh dari kurikulum yang didasarkan atas struktur pengetahuan adalah *Man: A Course of Study* (MACOS). MACOS adalah suatu kurikulum untuk sekolah dasar, terdiri atas buku-buku, film, poster, rekaman, permainan dan perlengkapan kelas lainnya. Kurikulum ini ditujukan untuk mengadakan penyempurnaan dalam pembelajaran ilmu sosial dan humanitas, dengan pengarah dan bimbingan dari Bruner. Para pengembang kurikulum mengharapkan para peserta didik dapat menggali faktor-faktor penting yang akan menjadikan manusia sebagai manusia. Melalui perbandingan dengan binatang, anak mengetahui keadaan biologis dari manusia. Dengan

membandingkan manusia dari suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya, anak-anak akan mempelajari aspek-aspek universal dari kebudayaan manusia (Oliva, 1992:185).

Sasaran utama dari kurikulum model MACOS adalah perkembangan kemampuan intelektual, yaitu membangkitkan penghargaan dan keyakinan akan kemampuan sendiri dan memberikan serangkaian cara-cara kerja yang memungkinkan anak walaupun dengan cara sederhana mampu menganalisis kehidupan sosial.

Sekurang-kurangnya ada tiga pendekatan dalam perkembangan dari Kurikulum Subyek Akademis. Pendekatan pertama, melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan. Pendekatan kedua, adalah studi yang bersifat integratif. Pendekatan ini merupakan respon terhadap perkembangan masyarakat yang menuntut model-model pengetahuan yang lebih bersifat komprehensif-terpadu. Mereka mengembangkan suatu model kurikulum yang terintegrasi (*integrated curriculum*). Pendekatan ketiga, adalah pendekatan yang dilaksanakan pada sekolah-sekolah fundamentalis. Mereka tetap mengajar berdasarkan mata-mata pelajaran dengan tekanan kepada membaca, menulis, dan memecahkan masalah-masalah matematis. Pelajaran-pelajaran lain seperti ilmu kealaman, ilmu sosial dan lain-lain, dipelajari tanpa dihubungkan dengan kebutuhan praktis pemecahan masalah dalam kehidupan.

b. Kurikulum Humanistik

Model kurikulum humanistik menekankan pengembangan kepribadian peserta didik secara utuh dan seimbang, antara perkembangan segi intelektual, afektif, dengan psikomotor. Kurikulum humanistik menekankan pengembangan potensi dan kemampuan dengan memperhatikan minat dan kebutuhan peserta didik. Pembelajarannya berpusat pada peserta didik, *student centered* atau *student based teaching*, peserta didik menjadi subyek dan pusat kegiatan. Pembelajaran segi-segi sosial, moral, dan afektif mendapat perhatian utama dalam model kurikulum ini. Model kurikulum ini berkembang dan digunakan dalam pendidikan pribadi.

Kurikulum humanistik dikembangkan oleh para ahli pendidikan humanistik, didasari oleh konsep-konsep pendidikan

pribadi (*Personalized Education*) yaitu John Dewey (*Progressive Education*) dan J.J. Rousseau (*Romantic Education*). Konsep ini lebih memberikan tempat utama kepada peserta didik. Mereka bertolak dari asumsi bahwa anak atau peserta didik adalah yang pertama dan utama dalam pendidikan. Ia adalah subyek yang menjadi pusat kegiatan pendidikan. Mereka percaya bahwa peserta didik mempunyai potensi-potensi, punya kemampuan dan kekuatan untuk berkembang sendiri. Para pendidik humanis juga berpegang kepada konsep Gestalt, bahwa individu atau anak merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Pendidikan diarahkan kepada membina manusia yang utuh bukan saja segi fisik dan intelektual tetapi juga segi sosial dan afektif: emosi, sikap, perasaan, minat, nilai, dan lain-lain.

Pandangan mereka berkembang sebagai reaksi terhadap pendidikan yang lebih menekankan segi intelektual dengan peran utama dipegang oleh guru. Pendidikan humanistik menekankan peranan peserta didik. Pendidikan merupakan suatu upaya untuk menciptakan situasi yang permisif, rileks, akrab. Menurut Mc Neil "*The new humanists are self actualizers who see curriculum as a liberating process that can meet the need for growth and personal integrity*" (Oliva, 1992:24). Tugas guru adalah menciptakan situasi yang permisif dan mendorong peserta didik untuk mencari dan mengembangkan pemecahan sendiri.

c. Kurikulum Rekonstruksi Sosial

Kurikulum rekonstruksi sosial berbeda dengan model-model kurikulum lainnya, lebih memusatkan perhatiannya pada problema-problema yang dihadapi dalam masyarakat. Kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan Interaksional. Menurut mereka pendidikan bukanlah merupakan upaya sendiri, tetapi merupakan kegiatan bersama, interaksi, kerjasama. Kerjasama atau interaksi bukan hanya terjadi antara peserta didik dengan guru, tetapi juga antara peserta didik dengan peserta didik, peserta didik dengan orang-orang di lingkungannya dan dengan sumber-sumber belajar lainnya. Melalui interaksi dan kerjasama ini peserta didik berusaha memecahkan problema-problema yang dihadapinya dalam masyarakat menuju pembentukan masyarakat yang lebih baik.

Theodore Brameld, pada awal tahun 1950-an mengemukakan

gagasannya tentang rekonstruksi sosial. Di dalam masyarakat demokratis, seluruh warga masyarakat harus turut serta dalam perkembangan dan pembaharuan masyarakat. Untuk melaksanakan hal itu sekolah mempunyai posisi yang cukup penting. Sekolah bukan saja dapat membantu individu memperkembangkan kemampuan sosialnya, tetapi juga dapat membantu bagaimana berpartisipasi sebaik-baiknya dalam kegiatan sosial (Syaudih, 2004: 124).

Para Rekonstruksionis Sosial tidak mau terlalu menekankan kebebasan individu. Mereka ingin meyakinkan para peserta didik bagaimana masyarakat telah membuat warganya seperti adanya sekarang dan bagaimana masyarakat memenuhi kebutuhan pribadi warganya melalui konsensus sosial. Brameld juga ingin memberikan keyakinan tentang pentingnya perubahan sosial. Perubahan sosial tersebut harus dicapai melalui prosedur demokrasi. Para rekonstruksi sosial menentang intimidasi, menakut-nakuti, dan kompromi semu. Mereka mendorong agar para peserta didik mempunyai pengetahuan yang cukup tentang masalah-masalah sosial yang mendesak (*crucial*) dan kerjasama atau bergotong royong untuk memecahkannya.

Kurikulum Rekonstruksi Sosial memiliki komponen-komponen yang sama dengan model kurikulum lain tetapi isi dan bentuk-bentuknya berbeda.

1) Tujuan dan isi kurikulum

Setiap tahun program pendidikan mempunyai tujuan yang berbeda. Dalam program pendidikan ekonomi-politik, umpamanya untuk tahun pertama tujuannya membangun kembali dunia ekonomi-politik. Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah (1) mengadakan survai kritis terhadap masyarakat (2) mengadakan studi tentang hubungan antara keadaan ekonomi lokal dengan ekonomi nasional dan dunia, (3) mengadakan studi tentang latar belakang historis dan kecenderungan-kecenderungan perkembangan ekonomi, hubungannya dengan ekonomi lokal, (4) mengkaji praktek politik dalam hubungannya dengan faktor ekonomi, (5) memantapkan rencana perubahan praktek politik, (6) mengevaluasi semua rencana dengan kriteria apakah telah memenuhi kepentingan sebagian terbesar orang (Nasution, 1984: 28).

2) Metoda

Dalam pembelajaran Rekonstruksi Sosial para pengembang kurikulum berusaha mencari keselarasan antara tujuan-tujuan nasional dengan tujuan peserta didik. Guru-guru berusaha membantu para peserta didik menemukan minat dan kebutuhannya. Para peserta didik sesuai dengan minatnya masing-masing, baik dalam kegiatan pleno maupun kelompok-kelompok berusaha memecahkan masalah sosial yang dihadapinya. Kerjasama baik antara individu dalam kegiatan kelompok, maupun antarkelompok dalam kegiatan pleno sangat mewarnai metoda rekonstruksi sosial. Kerjasama ini juga terjadi antara para peserta didik dengan manusia sumber dari masyarakat. Bagi rekonstruksi sosial, belajar merupakan kegiatan bersama, ada ketergantungan antara seorang dengan yang lainnya. Dalam kegiatan belajar mereka tidak ada kompetisi, yang ada adalah kooperasi atau kerjasama, saling pengertian dan konsensus. Anak-anak sejak sekolah dasarpun diharuskan turut serta dalam survai kemasyarakatan serta kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Untuk kelas-kelas tertinggi selain mereka dihadapkan kepada situasi nyata juga mereka diperkenalkan dengan situasi-situasi ideal. Dengan hal itu diharapkan para peserta didik dapat menciptakan model-model kasar dari situasi yang akan datang (Nasution, 1984: 68).

3) Evaluasi

Dalam kegiatan evaluasi para peserta didik juga dipartisipasikan. Partisipasi mereka terutama dalam memilih, menyusun, dan menilai bahan yang akan diujikan. Soal-soal yang akan diujikan dinilai lebih dulu baik ketepatan maupun keluasan isinya, juga keampuhannya menilai pencapaian tujuan-tujuan pembangunan masyarakat yang sifatnya kualitatif. Evaluasi tidak hanya menilai apa yang telah dikuasai peserta didik, tetapi juga menilai pengaruh dari kegiatan sekolah terhadap masyarakat. Pengaruh tersebut terutama menyangkut perkembangan masyarakat dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat.

d. Kurikulum Kompetensi

Seiring dengan perkembangan zaman di mana informasi semakin melimpah, cepat, dan mudah diperoleh, maka pemilikan kompetensi menjadi suatu kerharusan untuk menyesuaikan dengan

perubahan. Kompetensi dapat didefinisikan sebagai pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diwujudkan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak (Depdiknas, 2004).

Abad dua puluh ditandai oleh perkembangan teknologi yang sangat pesat. Perkembangan teknologi mempengaruhi setiap bidang dan aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan. Sejak dahulu teknologi telah diterapkan dalam pendidikan, tetapi yang digunakan adalah teknologi sederhana seperti penggunaan papan tulis dan kapur, pena dan tinta, sabak dan grip, dan lain-lain. Dewasa ini sesuai dengan tahap perkembangannya yang digunakan adalah teknologi maju, seperti audio dan *video cassette*, *overhead projector*, *film slide* dan *motion film*, mesin pembelajaran, komputer, CD-rom, dan internet.

Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, di bidang pendidikan berkembang pula teknologi pendidikan. Aliran ini ada persamaannya dengan pendidikan klasik, yaitu menekankan isi kurikulum, tetapi diarahkan bukan pada pemeliharaan dan pengawetan ilmu tersebut tetapi pada penguasaan kemampuan atau kompetensi (Hamalik, 2008:146). Suatu kompetensi yang besar diuraikan menjadi kompetensi yang lebih sempit/khusus dan akhirnya menjadi perilaku atau kegiatan (*performance*) yang dapat diamati atau diukur. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan khususnya kurikulum adalah dalam dua bentuk, yaitu bentuk perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*). Penerapan teknologi perangkat keras dalam pendidikan dikenal sebagai teknologi alat (*tools technology*), sedang penerapan teknologi perangkat lunak disebut juga teknologi sistem (*system technology*) (Ibrahim & Kayadi, 1994: 29).

Teknologi pendidikan dalam arti teknologi alat, lebih menekankan kepada penggunaan alat-alat teknologis untuk menunjang efisiensi dan efektivitas pendidikan. Di dalam kurikulumnya berisi rancangan atau desain kurikulum yang ditunjang oleh penggunaan media atau alat bantu pembelajaran. Dalam arti teknologi sistem, teknologi pendidikan menekankan kepada penyusunan program pembelajaran atau rencana pembelajaran dengan menggunakan pendekatan sistem. Program pembelajaran ini bisa semata-mata program sistem, bisa program sistem yang ditunjang dengan alat dan media, dan bisa juga program sistem yang dipadukan dengan alat dan media pembelajaran (Syaudih, 2004: 124).

Pada bentuk pertama, pembelajaran tidak membutuhkan alat dan media yang canggih, tetapi bahan ajar dan proses pembelajaran disusun secara sistem dalam bentuk satuan pelajaran (*lesson unit*). Alat dan media digunakan sesuai dengan kondisi tetapi tidak terlalu dipentingkan.

Pada bentuk kedua, pembelajaran disusun secara sistem dan ditunjang dengan penggunaan alat dan media pembelajaran. Penggunaan alat dan media belum terintegrasi dengan program pembelajaran, bersifat "*on-off*", yaitu bila digunakan alat dan media akan lebih baik, tetapi bila tidak menggunakan alatpun pembelajaran masih tetap berjalan.

Pada bentuk ketiga program pembelajaran telah disusun secara terpadu antara bahan dan kegiatan pembelajaran dengan alat dan media. Bahan ajaran telah disusun dalam kaset audio, video atau film, atau diprogramkan dalam komputer. Pembelajaran tidak bisa berjalan tanpa melibatkan penggunaan alat-alat dan program tersebut. Contoh-contoh dari model desain pembelajaran tersebut adalah: pembelajaran berprogram, pembelajaran dengan menggunakan video, audio, film, pembelajaran dengan bantuan komputer (*compter aided instruction* atau CAI), belajar dengan bantuan computer (*computer aided learning* atau CAL), pembelajaran modul, pembelajaran melalui internet (*e-learning* atau *web site learning*), dan lain-lain.

Ada beberapa ciri dari kurikulum kompetensi yang dikembangkan dari konsep teknologi pendidikan, yaitu: 1) Tujuan, tujuan diarahkan pada penguasaan kemampuan akademik, kemampuan vokasional, atau kemampuan pribadi yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi. Tujuan-tujuan yang bersifat umum yaitu standar kompetensi dirinci menjadi tujuan-tujuan yang lebih khusus (kompetensi dasar), yang kemudian dijabarkan lagi menjadi perilaku yang dapat diukur atau performansi (indikator); 2) Metoda, metoda yang merupakan kegiatan pembelajaran sering dipandang sebagai proses mereaksi terhadap perangsang-perangsang yang diberikan dan apabila terjadi respons yang diharapkan maka respons tersebut diperkuat. Tujuan-tujuan pembelajaran telah ditentukan sebelumnya. Pembelajaran dalam konsep awalnya bersifat individual, tiap peserta didik menghadapi serentetan tugas yang harus dikerjakannya, dan maju sesuai dengan kecepatan masing-masing. Pada saat tertentu ada

tugas-tugas yang harus dikerjakan secara kelompok. Setiap peserta didik harus menguasai secara tuntas tujuan-tujuan dari program pembelajaran (pembelajaran tuntas).

Pelaksanaan pembelajaran mengikuti langkah-langkah sebagai berikut, a) Penegasan tujuan. Para peserta didik diberi penjelasan tentang pentingnya bahan yang harus dipelajari. Sebagai tanda menguasai bahan mereka harus menguasai secara tuntas tujuan-tujuan dari suatu program; b) Pelaksanaan pembelajaran. Para peserta didik belajar secara individual melalui media buku-buku ataupun media elektronik. Dalam kegiatan belajarnya mereka dapat menguasai keterampilan-keterampilan dasar ataupun perilaku-perilaku yang dinyatakan dalam tujuan program. Mereka belajar dengan cara memberikan respons secara cepat terhadap persoalan-persoalan yang diberikan; c) Pengetahuan tentang hasil. Kemajuan peserta didik dapat segera diketahui oleh peserta didik sendiri, sebab dalam model kurikulum ini umpan balik selalu diberikan. Para peserta didik dapat segera mengetahui apa yang telah mereka kuasai dan apa yang masih harus dipelajari lebih serius. 3) Organisasi bahan ajaran, bahan ajaran atau isi kurikulum banyak diambil dari disiplin ilmu, tetapi telah diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan sesuatu kompetensi. Bahan ajaran atau kompetensi yang luas/besar dirinci menjadi bagian-bagian atau sub kompetensi yang lebih kecil, yang menggambarkan obyektif. Urutan dari obyektif-obyektif ini pada dasarnya menjadi inti dari organisasi bahan, 4) Evaluasi, kegiatan evaluasi dilakukan pada setiap saat, pada akhir suatu pelajaran, suatu unit, ataupun semester. Fungsi evaluasi ini bermacam-macam, sebagai umpan balik bagi peserta didik dalam penyempurnaan penguasaan suatu satuan pelajaran (evaluasi formatif), umpan balik bagi peserta didik pada akhir suatu program atau semester (evaluasi sumatif). Juga dapat menjadi umpan balik bagi guru dan pengembang kurikulum untuk penyempurnaan kurikulum. Evaluasi yang mereka gunakan umumnya berbentuk penilaian kompetensi. Sesuai dengan landasan pemikiran mereka, bahwa model pembelajarannya menekankan sifat ilmiah, bentuk penilaian ini dipandang yang paling cocok, dapat mengukur perilaku atau performansi (Syaudih, 2004: 36).

Program pembelajaran teknologis sangat menekankan efisiensi dan efektivitas. Program dikembangkan melalui beberapa kegiatan

uji coba dengan sampel-sampel dari suatu populasi yang sesuai, direvisi beberapa kali sampai standar yang diharapkan dapat dicapai. Dengan model pembelajaran ini tingkat penguasaan peserta didik dalam standar konvensional jauh lebih tinggi dibandingkan dengan model-model lain. Apalagi kalau digunakan program-program yang lebih berstruktur seperti pembelajaran berprogram, pembelajaran modul, atau pembelajaran dengan bantuan video dan komputer, yang dilengkapi dengan sistem umpan balik dan pembimbingan dari tutor yang teratur dapat mempercepat dan meningkatkan penguasaan peserta didik.

Meskipun memiliki kelebihan-kelebihan, kurikulum teknologis tidak terlepas dari beberapa keterbatasan atau kelemahan. Model ini terbatas kemampuannya untuk mengajarkan bahan ajaran yang kompleks atau membutuhkan penguasaan tingkat tinggi (analisis-sintetis, evaluasi, pemecahan masalah dan kreativitas) juga bahan-bahan ajaran yang bersifat afektif. Beberapa percobaan menunjukkan kemampuan peserta didik untuk mentransfer hasil belajar cukup rendah. Pembelajaran teknologis sukar untuk dapat melayani bakat-bakat peserta didik belajar dengan metoda-metoda khusus. Metoda mengajar mereka cenderung seragam. Keberhasilan belajar peserta didik juga sangat dipengaruhi oleh sikap mereka; bila sikapnya positif maka peserta didik akan berhasil, tetapi bila sikapnya negatif, tingkat penguasaannya pun relatif rendah. Masalah kebosanan juga berpengaruh terhadap proses belajar.

4. Faktor-Faktor yang Berpengaruh terhadap Pengembangan Kurikulum

Pengembangan kurikulum pendidikan dasar harus dikaitkan dengan karakteristik kualitas sumber daya manusia yang diperlukan untuk kehidupan mereka di masyarakat, dan sekaligus mempertimbangkan karakteristik perbedaan kelompok peserta didik di masing-masing jenis dan jenjang satuan pendidikan dasar. Konsep dasar yang komprehensif dan luas tentang fungsi pokok pendidikan dasar tidak hanya dipergunakan untuk masyarakat, tetapi hendaknya tertuju pada suatu kajian tentang praktek dan kebijakan pendidikan dasar pada tingkat awal dari semua negara. Tujuannya, untuk memberikan suatu landasan yang mantap bagi praktek belajar peserta

didik di masa depan dan mengembangkan keterampilan hidup (*life skills*) yang esensial untuk membekali peserta didik agar mampu hidup bermasyarakat.

Dalam menghadapi harapan dan tantangan masa depan yang lebih baik, pendidikan dipandang sebagai esensi kehidupan, baik bagi perkembangan pribadi maupun perkembangan masyarakat. Misi pendidikan, termasuk pendidikan dasar, adalah memungkinkan setiap orang, tanpa kecuali, mengembangkan sepenuhnya semua bakatindividu, dan mewujudkan potensi kreatifnya, termasuk tanggung jawab terhadap dirisendiri, dan pencapaian tujuan pribadi. Misi itu akan dapat tercapai melalui strategi yang disebut belajar sepanjang hidup (*learning throughout life*), yang dipandang sebagai detak jantung dari masyarakat.

Hal ini berarti bahwa kurikulum (program Kajian Kebijakan Kurikulum SD – Tahun 2007 9 belajar) pendidikan dasar harus memfasilitasi peserta didik untuk belajar lebih bebas dan mempunyai pandangan sendiri yang disertai dengan rasa tanggung jawab pribadi yang lebih kuat untuk mencapai tujuan hidup pribadinya atau tujuan bersama sebagai anggota masyarakat. Untuk mencapai tujuan pendidikan yang bermutu untuk seluruh lapisan peserta didik pendidikan dasar, maka pengembangan kurikulumnya harus dirancang sebagai keseluruhan dari penawaran lembaga pendidikan (sekolah) termasuk kegiatan di luar kelas/sekolah dengan rangkaian mata pelajaran dan kegiatan yang terpadu. Setiap satuan pendidikan memperoleh identitas atas dasar caranya mereka menjalankan program-program belajar yang dikembangkannya. Faktor-faktor yang menentukan isi tiap program harus muncul jauh di luar batas-batas sekolah/satuan pendidikan. Faktor-faktor itu timbul melalui kekuatan-kekuatan sosial, kultural, ekonomi, dan politik. Kurikulum suatu sekolah/satuan pendidikan dasar harus mewakili keseluruhan sistem pengaruh yang membangun lingkungan belajar bagi peserta didik. Program itu sendiri terdiri atas unsur-unsur tertentu yang mencakup maksud dan tujuan, kurikulum, metode pembelajaran, dan evaluasi hasil belajar peserta didik.

Pengembangan program belajar (kurikulum) pada tingkat pendidikan dasar harusmeliputi hal-hal esensial yang dibutuhkan peserta didik, seperti: bidang-bidang studi apa yang akan disajikan;

untuk maksud-maksud khusus apa bidang studi tersebut disajikan; bagaimana bidang studi tersebut hendak disusun dan dihubungkan; dan bagaimana bidang studi tersebut diajarkan kepada peserta didik.

Secara konseptual, pengembangan kurikulum pendidikan dasar masa depan perlu mangakomodasikan secara sistematis dimensi-dimensi pengembangan peserta didik sebagai berikut: 1). Pengembangan individu - aspek-aspek hidup pribadi (dimensi pribadi); 2). Pengembangan cara berpikir dan teknik memeriksa – kecerdasan yang terlatih (dimensi kecerdasan); 3). Penyebaran warisan budaya – nilai-nilai civic dan moral bangsa (dimensi sosial); 4). Pemenuhan kebutuhan sosial yang vital dan menyumbang kepada kesejahteraan (Hamalik, 2008: 211). Untuk mendukung keterlaksanaan pengembangan kurikulum pendidikan dasar masa depan tersebut di atas, perlu dikembangkan suatu masyarakat belajar (*learning society*) pada setiap satuan pendidikan dasar. Hal tersebut dimungkinkan, karena setiap aspek kehidupan, baik pada tingkat individual maupun sosial, menawarkan kesempatan untuk belajar dan bekerja. Oleh karena itu, pengembangan program belajar (kurikulum) pendidikan dasar di masa depan perlu mendorong dan memfasilitasi penggalan potensipendidikan dari media teknologi informasi modern, dunia kerja atau kultural, dan pengisian waktu luang. Selain itu, perlu dikembangkan pula kebiasaan peserta didik untuk memanfaatkan setiap kesempatan untuk belajar dan mengembangkan diri, baik yang terkait dengan apa yang mereka pelajari di satuan pendidikannya, maupun yang terkait dengan pemecahan masalah yang dihadapi dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Dalam implementasi kurikulum ini Mulyani Sumantri, 1988: 23) membedakan tiga model implementasi yang terletak dalam suatu garis kontinum. Pada ujung paling kiri terletak model implementasi *Fidelity*, di tengahnya model *Mutual adaptive* dan pada ujung paling kanan adalah *Enactment*. Sehingga susunannya seperti berikut: *Fidelity Mutual adaptive Enactment*.

Dalam model *Fidelity*, implementasi kurikulum harus persis sesuai dengan desain kurikulum. Desain kurikulumnya bersifat standar, dokumen kurikulum lengkap, dan seluruh komponen kurikulum telah dijabarkan secara rinci.

Mutual adaptive, implementasi kurikulum memperhatikan kondisi, situasi dan kebutuhan peserta didik yang belajar saat itu. Guru mengadakan perubahan atau penyempurnaan sesuai kondisi dan situasi sekolah dan kebutuhan perkembangan peserta didik yang belajar. Desain kurikulum standar hanya berisi komponen pokok, sebagai kurikulum inti, penjabarannya dilakukan oleh guru. Model *Enactment*, guru menyusun dan mengimplementasikan kurikulum sesuai dengan kondisi setempat, baik kondisi, kebutuhan, perkembangan peserta didik maupun sekolah dan masyarakat sekitarnya.

Model *fidelity* biasanya diterapkan dalam kurikulum standar yang bersifat nasional, dapat juga diterapkan dalam kurikulum satuan pendidikan, asal desain kurikulum tersebut sudah standar, semua komponen kurikulumnya sudah terumuskan secara rinci dengan indikator-indikator yang jelas. Para pelaksana kurikulum, yaitu guru tinggal melaksanakan sesuai dengan desain tersebut. Penyusunan kurikulum standar pada tingkat satuan pendidikan di Indonesia membutuhkan waktu, mengingat kondisi dan tahap perkembangan satuan pendidikan yang ada saat ini sangat beragam. Mengingat hal itu, model implementasi kurikulum yang mungkin lebih banyak dapat digunakan dalam pelaksanaan KTSP adalah model mutual adaptif dan/atau enactment. Guru dalam mengimplementasikan desain kurikulum yang telah mereka susun dapat mengadakan penyesuaian-penyesuaian sesuai kondisi, kebutuhan dan perkembangan peserta didik, lembaga pendidikan dan masyarakat, tetapi tetap dengan sasaran perkembangan peserta didik secara optimal. Dalam implementasi yang bersifat mutual adaptif dan enactment tersebut, upaya ke arah pengembangan desain kurikulum yang bersifat standar, perlu terus dilakukan.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Indonesia akan memasuki babak baru pengembangan pendidikan standar. Pendidikan ini diarahkan pada pencapaian atau penguasaan standar tingkat tinggi, kelas dunia atau kelas nasional, walaupun dapat saja standar kelas lokal. Pengembangan pendidikan ini sepertinya mengabaikan keragaman kondisi daerah dan kemampuan peserta didik.

Pada negara-negara yang telah menerapkan pendidikan standar, keragaman tersebut diakui adanya, tetapi tidak menjadi penghalang untuk dilaksanakan. Pendidikan standar atau *"Standards-based education (SBE) is based on the belief that all students are capable of meeting high standards"* (Parkay, FW. et all (2006: 223). Mulai tahun 1990 Amerika Serikat menerapkan pendidikan standar. Berkenaan dengan penerapan pendidikan ini di Amerika Serikat lebh lanjut Parkay et al(2006: 224) menjelaskan: *"In the past, expectations for students from poor families and students who are member of minority groups are sometimes lower than for other students. Today's, SBE is seen as a way of ensuring that excellence and equity become part of our nation's public school system"*. Walaupun dalam kondisi dan tahap perkembangan masyarakat yang berbeda, dengan kesungguhan dan kerja keras, secara berangsur pendidikan standar diharapkan dapat diterapkan di Indonesia.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dinyatakan ada delapan standar nasional pendidikan, yaitu standar: isi, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan. Kurikulum secara operasional berkenaan dengan seluruh komponen pendidikan yang distandarkan, tetapi dalam desainnya terutama berkenaan dengan komponen: kemampuan lulusan, isi, proses, dan penilaian hasil pembelajaran.

Banyak pandangan tentang kurikulum standar, secara konseptual para ahli (Parkay, et all; Marsh, CJ; Marzano & Kendall; etc.) membedakan antara standar isi (*content standards*) dan standar performansi (*performance standards*). Standar isi berkenaan dengan pengetahuan dan keterampilan yang harus dikuasai peserta didik dalam berbagai mata pelajaran, *" what students should know and be able to do"*. Standar performansi menunjukkan tingkat penguasaan peserta didik dalam standar isi, *" how good is is good enough"* (Parkay, 2006: 225). Keduanya tidak dapat dipisahkan, dan standarnya sendiri sebenarnya terletak dalam tingkat performansinya, inilah yang menentukan apakah standar tersebut standar internasional, nasional atau lokal, bahkan sekolah.

Dalam KTSP, standar isi sudah ditentukan dan dirumuskan dalam standar kompetensi lulusan, standar kompetensi, dan kompe-

tensi dasar tiap mata pelajaran, dan ini merupakan standar kompetensi nasional minimal. Dengan demikian satuan pendidikan dapat menambahnya. Mengenai standar performansinya tidak dinyatakan dalam ketentuan-ketentuan KTSP, hal itu berarti sekolah atau daerah dapat menentukan sendiri.

Pengembangan pendidikan standar diarahkan pada realisasi pendidikan secara profesional. Hal itu sudah dimulai dengan pengembangan profesi guru dan dosen menuju terwujudnya guru dan dosen profesional, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pendidikan yang dilaksanakan secara profesional, oleh guru-guru dan dosen profesional, akan melahirkan lulusan yang menguasai isi dan performansi standar dan profesional pula.

Dalam KTSP, untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mata-mata pelajaran dikelompokkan atas: agama dan akhlak mulia; kewarganegaraan dan akhlak kepribadian; ilmu pengetahuan dan teknologi; estetika; jasmani, olah raga, dan kesehatan. Penguasaan isi dan performansi secara standar dalam bidang atau kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; kewarganegaraan dan akhlak kepribadian; estetika; dan jasmani, olah raga, dan kesehatan mengarah pada pengembangan lulusan yang memiliki integritas kepribadian dan komitmen nilai yang tinggi. Penguasaan isi dan performansi secara standar dalam kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi mengarah pada pengembangan lulusan yang memiliki keunggulan dan daya saing yang tinggi.

Keduanya menjadi landasan dalam pengembangan profesionalisme, sebab profesionalisme didasari oleh penguasaan pengetahuan dan kemampuan secara standar (keunggulan dan daya saing), dan berkinerja secara standar (integritas kepribadian dan komitmen pada nilai). Keduanya berkembang dan dikembangkan melalui pendidikan, latihan, pengalaman sebelumnya, pembinaan dan penciptaan iklim kerja dalam lingkungan kerja saat ini.

5. Analisis Kritis terhadap Politisasi Pendidikan dan Ekonomi dalam Perubahan Kurikulum

Terjadinya perubahan kurikulum dari waktu ke waktu selalu menggunakan asumsi mengikuti dinamika perkembangan

IPTEK, dimana pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus menjadi garda terdepan dalam semangat perubahan kurikulum. Disisi lain sebenarnya asumsi di atas tidak pernah sinkron dan terwujud dalam praktek perubahan kurikulum. Sebagai contoh perubahan kurikulum 1964 sebenarnya politik untuk meniadakan MANIPOL-USDEK, lalu kurikulum 1975 digunakan untuk tujuan politik pemerintah memasukkan Pendidikan Moral Pancasila, dimana pendidikan harus memberikan doktrin-doktrin moral pancasila yang sakti mandraguna dan semua elemen bangsa tidak boleh memberikan kritik apaun karena akan dibenturkan dengan istilah melanggar pancasila dan sebagai komunis.

Perubahan kurikulum 1984 digunakan untuk tujuan politik yaitu memasukkan mata pelajaran Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB). Dampak perubahan kurikulum ini memberikan doktrin-doktrin kepada siswa tentang pentingnya sejarah perjuangan bangsa yang semua kemasanya tidak terbuka untuk dikritisi namun lebih pada mengedepankan tujuan tertentu agar siswa mendukung hegemoni kekuasaan pemerintah. Pada era Orde baru, perubahan kurikulum sangat tampak ada sebuah pergesekan doktrin politik, seiring pergantian politik pada era reformasi pada perkembangannya tidak jauh berbeda dengan orde sebelumnya dalam politisasi pendidikan, hanya saja pada era reformasi doktrin tersebut tidak nampak secara “blak-blakan” karena dalam praktek pemerintahan terdapat adanya kritik dari luar.

Jika kurikulum dimaknai sebagai jantung atau ruhnya pendidikan, maka perubahan kurikulum semata-mata karena pendidikan harus merespon situasi perkembangan. Idealnya perkembangan selalu menuju perbaikan bukan sebaliknya. Perubahan kurikulum tidak hanya mengulang lembaran lama yang sudah usang dan sekedar mengarah pada tujuan politik pemerintah semata. Perubahan kurikulum tahun 2004 dengan nama kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang disempurnakan dalam implementasinya pada kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) tahun 2006 secara teoritis terdapat perubahan positif. Akan tetapi dalam implementasinya perubahan tersebut berujung pada ukuran keberhasilan pendidikan yang didasarkan pada aspek kognitif (UAN). Hal tersebut menyebabkan proses pendidikan tidak lagi berdasarkan

kompetensi siswa semata tapi bergeser kembali pada eksplorasi pengetahuan agar lulus dalam ujian.

Jika pendidikan hanya terfokus pada ukuran kognitif maka akan mudah dijadikan kendaraan pemerintah untuk pendidikan politik di sekolah dan selama itu pula pendidikan tidak akan bisa mengembangkan kompetensi siswa menjadi dirinya sendiri yang harus dieksplorasi semua kemampuannya secara menyeluruh menyangkut kognisi, afeksinya dan sosialnya. Sehingga bertolak dari pemahaman tersebut, persoalan yang berhubungan dengan nilai-nilai moral akan tercapai melalui pendidikan afeksi, sedang kualitas pengembangan ilmu pengetahuan tercapai melalui pendidikan kognisi serta budaya sosial kemasyarakatan yang diwadahi dalam muatan lokal masing-masing daerah agar menjadi warga masyarakat yang selalu menjunjung nilai-nilai budaya sendiri yang dianggap “adhi luhung”.

C. Simpulan

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut: Pertama, kurikulum dibutuhkan adanya perubahan setiap saat karena kurikulum akan selalu merespon adanya perkembangan dalam kehidupan, baik perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan sosial dan budaya, dan perkembangan politik.

Kedua, dalam perkembangan kurikulum harus memperhatikan beberapa unsur diantaranya, 1) peserta didik, 2) satuan pendidikan dan masyarakat, 3) peranan pengembang kurikulum terutama guru. Peserta didik sebagai obyek kurikulum harus mendapat mprioritas utama dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya satuan pendidikan dan masyarakat sebagai pengguna hasil pendidikan akan menjadi faktor terpenting dalam pengembangan, dan guru sebagai pelaksana kurikulum.

DAFTAR PUSTAKA

- Dakir, 2004. *Pengembangan Kurikulum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Depdiknas. 2005. *Peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang undang-undang guru dan dosen*. Jakarta: Depdiknas.
- Hamalik, Oemar. 1995. *Kurikulum Dan Pembelajaran*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 1993. *Model-Model Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PPS UPI.
- _____. 2008. *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Harsono, Eko Budi. 2004. *Undang-undang tentang Pendidikan Agama Islam*. Tersedia di <http://www.suarapembaruan.com/news/2004/01/10/kesra/ke02.htm>. Diakses pada Tanggal 5 Juni 2015.
- Ibrahim & Kayadi. 1994. *Pengembangan Inovasi dalam Kurikulum*, Jakarta: UT Depdikbud.
- Ihsan, Hamdani dan A. Fuad Ihsan. 2007. *Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sumantri, Mulyani. 1988. *Kurikulum dan Pengajaran*, Jakarta: Proyek LPTK.
- Mulyasa. 2005. *Menjadi kepala sekolah profesional*. Bandung: PT. Remaja Rodakarya.
- Nasution. 1984. *Dasar-Dasar Kurikulum*, Jakarta: Pustaka Nasional.
- Oliva, P. 1992. *Developing The Curriculum 3rd ed*. New York: Harpers Collin Publisher,
- Purkey, W.W. 2003. *Self-Concept and School Achievement*. Englewood liffs, NJ: Prentice Hall.
- Reddy, S.K. 1992. *Educational and Psychological Measurement: Effects of Ignoring Correlated Measurement Error In Structural Equation Models*, Sage Published, Educational

Sulthon

and Psychological Measurement, 1992. 52:549 Do1. 10.1177/00131264492052003005.

Sukmadinata, Nana Syaodih. (2004). *Kurikulum dan Pembelajaran Kompetensi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2006. *Pengembangan Kurikulum; Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

_____. 2009. *Pengembangan Kurikulum*. Bandung: Remaja Rosdakarya.